



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN SEKRETARIS  
JENDERAL DPR RI TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN  
KEAHLIAN DPR DALAM MENDUKUNG TUGAS DEWAN  
TANGGAL 11 NOVEMBER 2019**

---

Tahun Sidang : 2019- 2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 6 (enam)  
Jenis rapat : RDP  
Hari/tanggal : Senin, 11 November 2019  
P u k u l : 13.25 WIB s.d 15.30 WIB.  
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I  
A c a r a : RDP dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terkait tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung tugas Dewan

Ketua Rapat : Ach, Baidowi, S.Sos  
Hadir Pimpinan : - Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.;  
: - Rieke Diah Pitaloka, M.Hum  
: - Willy Aditya;  
: - Drs. H. Ibnu Multazam;

Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : \* 40 orang, ijin 5 orang dari 80 orang Anggota.  
: \* Pejabat BKD DPR RI dan Legal Drafter  
- Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang)  
- Drs. Helmizar, M.E.(Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara)  
- Dra. Tanti Sumartini, M.Si. (kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU)  
- Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.(Kepala Pusat Kajian Anggaran)

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (BKD) terkait tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung tugas Dewan dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Ach, Baidowi, S.Sos.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Sdr. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang) untuk menyampaikan masukan terkait tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung tugas Dewan

## **II. KESIMPULAN**

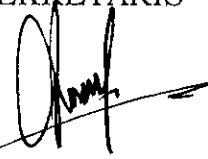
Rapat Baleg dengan Sekjen dan BK DPR RI menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. BKD dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi harus berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Badan Legislasi.
2. Meminta BKD untuk menyusun/mengumpulkan beberapa Peraturan DPR RI terkait dengan Perubahan Peraturan:
  - Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional disesuaikan dengan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib;
  - Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan RUU
3. Meminta BKD membuat kajian secara komprehensif (Legal Mapping) terhadap:
  - UU dan regulasi Sistem Pendidikan (Komisi X);
  - UU dan regulasi Sistem Jaminan Sosial (Komisi IX);
  - UU dan regulasi Kesejahteraan Sosial (Komisi VIII); dan
  - Omnibus Law (yang terkait dengan Cipta Lapangan Kerja dan UMKM
4. Meminta BKD membuat kajian atas UU yang sudah dilakukan Yudisial Review oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Meminta BKD untuk mendistribusikan daftar nama Staf Pendukung yang ada di BKD.

## **III. PENUTUP**

RDP Baleg dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terkait tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung tugas Dewan ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 11 November 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widiarto', written over a horizontal line.

WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001